KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggota DPR Rentan Cawe-Cawe Proyek Gedung
Tanggal : Senin, 27 April 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Anggota DPR Rentan Cawe-cawe Proyek Gedung

KOORDINATOR Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, meminta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpikir ulang mendukung rencana pembangunan gedung baru DPR. Ia menegaskan, jangan sampai publik menuding Presiden Jokowi hanya memikirkan elite.

Ia meminta Jokowi melakukan pengecekan untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai pembangunan gedung ini. Ia menegaskan, Jokowi harus mendapat informasi yang komprehensif.

"Apalagi harga bahan bakar minyak (BBM) kan naik terus dan menambah beban masyarakat. Dengan adanya tambahan kebijakan ini, jangan sampai Jokowi dicap hanya memikirkan elite," katanya.

Sebastian melanjutkan, Jokowi harus tahu kalau baru saja DPR mendapat tambahan dana sebesar Rp 1,6 triliun di tahun anggaran 2015. Tujuan anggaran ini katanya untuk mendukung kinerja lebih baik.

Faktanya, kata dia, kinerja para wakil rakyat ini belum maksimal. Para wakil rakyat ini justru bertengkar, hingga adu jotos. Sebastian menambahkan kalau DPR juga tidak sensitif dan berlindung dibalik Jokowi.

Mereka mengaku membangun gedung dengan persetujuan Jokowi. Padahal, kata dia, DPR mendapat banyak cap negatif, mulai dari kesan jelek seperti konflik internal, anggota DPR yang suka tawuran, merebut kekuasaan, hingga senang mendapat fasilitas. "Inilah yang merusak citra dewan dan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik ke dewan. Ini membuat DPR semakin terpuruk," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, yang menjadi konsentrasi fokus DPR adalah mengembalikan citranya. Tidak hanya itu, anggota DPR juga harus menata lembaga itu sehingga kinerjanya semakin baik. Para anggota legislatif ini juga mendorong disiplin sehingga produktivitasnya meningkat.

DPR juga diminta memperbaiki kinerja sekretariat jenderal, sehingga bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. "Artinya membangun gedung baru adalah prioritas sekian," ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Al Kadrie mendukung pembangunan Gedung baru DPR. Asalkan, pembangunan itu dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Sekretaris Fraksi Nasdem itu berpendapat, pembangunan gedung DPR oleh pemerintah guna menghilangkan praduga negatif terhadap DPR dan memastikan bahwa tak ada anggota Dewan yang ikut cawe-cawe di proyek pembangunan gedung DPR.

"Biar pemerintah yang melaksanakan pembangunannya karena mereka punya tenaga profesional. Nah, kami-DPR-yang mengawasi pekerjaan mereka," katanya, kemarin.

Syarif mengakui, pembangunan gedung baru kebutuhan mendesak. Sebab, fasilitas yang ada di Kompleks Parlemen tidak mendukung kinerja para legislator. Kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas para wakil Rakyat juga banyak yang rusak alias usang dimakan usia, seperti microfon yang kerap tidak berfungsi di ruang komisi, titik bocor dimana-mana, dan antrean lift yang panjang.

Lagi pula, lanjut Syarif, gedung DPR bukan milik personal atau milik anggota DPR. Melainkan milik negara.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru DPR, Jumat (24/4). Hal ini dikemukakannya saat pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015. Setya menyatakan kebijakan ini sudah disetujui Jokowi. ■ QAR